

Animo Masyarakat Terhadap Pendidikan Gratis di SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

Indrawati¹ Dwi Noviani² Muthmainnah³

Pascasarjana IAIQI Indralaya Sumatera Selatan Indonesia

Email; indrawati241973@gmail.com, dwi.noviani@iaiqi.ac.id, inaimuth1@gmail.com.

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted : 01-06-2023

Kata Kunci

Animo

Masyarakat

Pendidikan

Gratis

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk Mendeskripsikan serta mengkaji animo masyarakat terhadap pendidikan gratis di SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. Program Sekolah Gratis yang dibiayai dengan sharing dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membiayai biaya operasi non personalia. Dengan demikian masyarakat berkewajiban untuk menanggung biaya pribadi peserta didik, seperti seragam, buku dan alat tulis, sepatu, tas sekolah serta biaya transport peserta didik dari rumah ke sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui literatur yang terkait yaitu jurnal, buku, dokumen dan literatur online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya menyelenggarakan sekolah gratis tetapi juga menyediakan fasilitas laboratorium komputer, fasilitas antar jemput bagi peserta didik dan tersedianya bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar), SMK Nurul Huda memiliki ekstrakurikuler Hockey yang mengalami peningkatan juara 1 lomba di tingkat provinsi mulai tahun 2012 sampai sekarang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

ABSTRACT

Keywords

Public

Interest, Free

Education

This article aims to describe and examine the public interest in free education at SMK Nurul Huda, Ulak Kembahang Pemulutan Barat Village, Ogan Ilir District. The Free School Program, which is funded by sharing funds from the Provincial and District/City APBDs, is intended to finance non-personnel operating costs. Thus the community is obliged to bear the personal costs of students, such as uniforms, books and stationery, shoes, school bags and transportation costs for students from home to school. The method used in this research uses a qualitative approach with a type of literature study. The data collection techniques were obtained through related literature, namely journals, books, documents and online literature. The results of this study indicate that Nurul Huda Vocational School in Ulak Kembahang Village, Ogan Ilir Regency not only organizes free schools but also provides computer laboratory facilities, shuttle facilities for students and the availability of KIP assistance (Smart Indonesia Cards), Nurul Huda Vocational School has a Hockey extracurricular experience. the increase in 1st place winners at the provincial level starting in 2012 until now has increased every year.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat,

nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya (Karlina, et.al, 2022).

Hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan merupakan salah satu tujuan dari pendidikan. Tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Tujuan pendidikan juga bertujuan untuk membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pelajaran tersebut (Karlina, et.al, 2022).

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, Pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality atau persamaan, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aspek yang kedua yaitu equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas yang berbasis teknologi di sekolah dapat memberikan dampak positif, karena siswa dilengkapi teknologi internet yang menjadi kompleksitas proses pendidikan semakin meningkat. Faktor tersebut memang selalu diupayakan oleh sekolah agar menjadikan sekolah yang memiliki fasilitas lengkap serta dapat dimanfaatkan oleh siswa. Perpustakaan, laboratorium, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Hariyadi & Hariyati, 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *Library Reseach* yaitu data diambil dari jurnal, buku, dokumen dan literatur online. Teknik data penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan animo masyarakat terhadap pendidikan gratis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknologi *Content Analysis*, yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan data secara terpisah terkait pembahasan beberapa ide atau gagasan tokoh pendidikan, kemudian mendeskripsikan, mendiskusikan dan mengkritisnya. Selain itu, klasifikasikan data serupa dan analisis konten secara kritis untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan memadai (Mulyana, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Terhadap Pendidikan

Manusia dan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki pengaruh yang dinamis. Pendidikan dapat dijadikan sebuah investasi yang akan meningkatkan kualitas manusia di masa depan. Secara lebih luas, pendidikan dapat diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan keinginan dan kebutuhan akan sesuatu hal. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan manusia dalam menjalankan peran sebagai individu dan anggota masyarakat (Ristaulina, 2016).

Masyarakat seharusnya memandang pendidikan dari sudut pandang fungsi pedagogisnya, yaitu menyiapkan peserta didik agar mempunyai dua kompetensi sekaligus, iman dan takwa (imtak), dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Eksistensi minat yang terdapat pada diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Minat yang dimiliki dalam masyarakat berbeda namun akan mengalami perkembangan. Perkembangan minat sangat beriringan (paralel) dengan beberapa faktor yang memungkinkan keragaman tingkat minat terhadap suatu obyek minat.

Faktor-faktor tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan mental, kesempatan untuk belajar dan lingkungan. Selain faktor biologis, lingkungan dan variasi budaya, faktor masa (dekade) dan perubahan teknologi juga memiliki peran dalam perkembangan minat masyarakat. Sebuah dasar untuk pembelajaran dimasa yang akan datang (Ichsan, 2022).

SMK Nurul Huda yang berada di desa yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai petani biasanya terkndala dalam biaya sekolah. Sementara itu, dalam masyarakat yang berperan sebagai orang tua yang memilihkan sekolah gratis untuk anaknya beranggapan bahwa di sana lebih lengkap fasilitas yang diberikan, lingkungannya pun lebih nyaman. Mereka juga mengutamakan mencari kualitas, keamanan, dan kenyamanan anaknya ketika bersekolah (Heru, 2021). Para orang tua juga menjatuhkan pilihannya terhadap sekolah yang memiliki kualitas baik yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi anaknya yang akan memasuki sekolah tersebut.

2. Pendidikan Gratis

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Penegasan perundangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang diberikan oleh negara, sekaligus ingin menjadi kewajiban negara untuk memberikan layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi” (Solikhah, 2019).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah pada pendidikan, tahun 1984 pemerintah mencanangkan program wajib belajar 6 tahun. Kemudian program ini ditgkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994. Untuk mendukung

wajib belajar 9 tahun, dan upaya menghadirkan pendidikan gratis bagi warga negaranya pada tahun 2005 pemerintah mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih terlaksana sampai sekarang. Pemberian dana BOS ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah. Di tahun 2015 program wajib belajar kembali ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Kehadiran wajib belajar yang dicanangkan pemerintah, diikuti juga oleh program pendidikan gratis (Solikhah, 2019).

Program Sekolah Gratis yang dibiayai dengan sharing dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membiayai biaya operasi non personalia. Dengan demikian masyarakat berkewajiban untuk menanggung biaya pribadi peserta didik, seperti seragam, buku dan alat tulis, sepatu, tas sekolah serta biaya transport peserta didik dari rumah ke sekolah. Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Provinsi disalurkan langsung ke rekening sekolah sekolah swasta, madrasah Negeri/ Swasta. Sedangkan untuk sekolah negeri non madrasah dananya ditransfer ke Kas daerah Kabupaten/Kota masing masing .

Sejak Maret 2009 pendidikan di Sumatera Selatan Gratis. Artinya, ada beberapa komponen biaya pendidikan Sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:

1. Biaya investasi, 2. Biaya Operasional, 3. Biaya pribadi. Unit cost Program Sekolah Gratis per siswa pertahun yang berasal dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. SD/MI persiswa/tahun = Rp. 120.000.-
2. SMP/MTS persiswa/tahun = Rp. 180.000.-
3. SMA/MA persiswa/tahun = Rp.1.200.000,-
4. SMK Teknik persiswa/tahun = Rp.2.400.00,-
5. SMK Non Teknik persiswa/tahun = Rp.1.836.000

Pemerintah telah berupaya untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan dan terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Pemerintah melakukan

penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh siswa pada jenjang pendidikan. Penyediaan BOS ini ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Untuk jenjang pendidikan menengah disediakan bantuan operasional manajemen mutu yang ditujukan untuk membantu SMA/SMK/MA dalam menyediakan kebutuhan operasionalnya. Pemerintah juga telah meluncurkan program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dalam rangka memperluas akses ke sekolah menengah. Namun demikian pendanaan tersebut dinilai banyak pihak masih belum memadai karena dana BOS dan BOMM yang disalurkan belum mencakup semua komponen penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab terhadap pendidikan untuk seluruh penduduk, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan terobosan dengan melaksanakan Program Sekolah Gratis (PSG) sampai tingkat SMA/MA/SMK atau wajib belajar 12 tahun yang dimulai pada tahun ajaran 2009/2010. Sumber dana program berasal dari pendanaan bersama (cost sharing) antara APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBD kabupaten/kota.

Pemerataan pendidikan juga merupakan cakupan dari program desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut demi mencapai tujuan (Aristo, 2019). Dengan demikian, untuk mencapai pemerataan pendidikan maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa perlu memikirkan dengan matang kebijakan-kebijakan yang sarannya adalah untuk merealisasikan pemerataan pendidikan (Dimmera & Purnasari, 2019).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Adapun tujuan dari PIP ini adalah untuk membantu biaya sekolah peserta didik yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) (Septiandika, 2017).

Kebijakan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja (Walengko & Londa, 2019).

Hal yang menjadi daya tarik orang tua dalam memilih serta menyarankan bersekolah di sekolah gratis ialah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah. Masyarakat memang memerlukan pendidikan yang murah, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan pendidikan yang bermutu.

Layanan transportasi sekolah merupakan layanan antar jemput siswa yang disediakan sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Pemikiran dasar yang melatar belakangi perlunya sekolah menyediakan transportasi sekolah supaya para siswa datang dan pergi ke sekolah tepat waktu serta aman dan nyaman. Transportasi sekolah berfungsi sebagai bagian dari layanan khusus dalam menunjang pembentukan kualitas pendidikan di sekolah. Transportasi sekolah menjadi alat bagi siswa untuk datang dan pergi ke sekolah tepat waktu. Selain itu transportasi sekolah membantu menunjang dalam proses pembelajaran melalui kehadiran siswa tepat waktu ke sekolah. Dengan adanya transportasi sekolah siswa

datang tepat waktu sehingga mengurangi resiko adanya pengurangan poin bagi siswa yang terlambat datang.

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat sekolah yang ada di kota-kota besar sarana dan prasana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan yang di desa-desa atau tempat terpencil masih banyak ditemukan fasilitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang seadanya atau bahkan kurangnya tenaga pengajar. Padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam menunjang terjadinya proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di desa, pada wilayah perkotaanpun kita masih menemukan tidak meratanya sistem pendidikan .

3. Kualitas Program Sekolah Gratis

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, namun masi ada beberapa dari mereka yang belum merasakan hak tersebut dikarenakan masalah ekonomi dan faktor lainnya. oleh karena itu pemerintah pembuat program pendidikan gratis dengan harapan pemerataan pendidikan. Dengan adanya program pendidikan gratis ini berarti dapat meringankan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Pendidikan gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggara pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah .

Adanya program pendidikan gratis ini mampu meningkatkan jumlah peserta didik dari tahun ketahun. Peningkatan peserta didik dari kelas X menjadi 6 kelas. Sehingga pihak skolah terpaksa menolak peserta didik baru yang akan mendaftar dikarenakan tidak adanya ruangan lagi. Begitupun juga dengan tingkat kelulusan peserta didik yang juga terus megalami peningkatan.

a. Grafik peningkatan jumlah peserta didik



Gambar 1 : Grafiik peningkatan jumlah peserta didik dari tahun 2016 – 2019.

b. Grafiik peningkatan kelulusan peserta didik



Program pendidikan gratis merupakan suatu program dari pemerintah untuk pemerataan pendidikan agar peserta didik yang tinggal di daerah terpencil atau berasal dari keluarga yang kurang mampu juga dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Program pendidikan gratis sangat membantu orang tua dalam menyekolahkan anaknya dimana orang tua tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk biaya operasional sekolah maupun biaya SPP sekolah karena sudah dibantu oleh pemerintah (Walengko & Londa, 2019).

SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir memiliki tenaga kerja pengajar yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan. Kurangnya tenaga pendidik di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang

mau mengajar di daerah terpencil dan sangat jarang sekali seorang sarjana mau menyumbangkan jasanya untuk mengajar di daerah pedalaman.

Padahal masing-masing orang mempunyai hak untuk berpendidikan, akan tetapi pemerintah tidak membagi rata tenaga pendidikan yang baru lulusan sarjana sehingga banyak lulusan SMK terpaksa diangkat menjadi pengajar di daerah tersebut walaupun belum menempuh pendidikan di dalam perkuliahan dikarenakan lulusan sarjana tidak ada yang ingin mendidik di daerah terpencil karena dari itu dapat disimpulkan bahwa di Indonesia banyak yang pengangguran dikarenakan pendidikannya sangat minim.

Bisa dikatakan faktanya saat ini penugasan guru, ke wilayah pelosok masih sangat minim. Apalagi mereka yang memang berstatus sebagai ASN yang terkadang hanya ada satu dalam satu sekolah. Memang dari informasi yang ada di lapangan, masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Hal ini harus menjadi perhatian dari Pemprov khususnya Dinas Pendidikan.

Padahal pemerataan pendidikan juga merupakan cakupan dari program desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut demi mencapai tujuan (Aristo, 2019). Dengan demikian, untuk mencapai pemerataan pendidikan maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa perlu memikirkan dengan matang kebijakan-kebijakan yang sarannya adalah untuk merealisasikan pemerataan pendidikan (Walengko & Londa, 2019).

Pendidikan bisa dikatakan yang berkualitas jika pendidikan itu digunakan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berguna untuk peserta didik lulusan SMK Nurul Huda. Perlengkapan sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya pada sekolah SMK Nurul Huda tersedia bagi peserta didik karena mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan pendidikan berkualitas khususnya pada peserta didik SMK.

Laboratorium komputer salah satu sarana prasarana untuk meningkatkan kemampuan peserta didik serta untuk menunjang kegiatan pembelajaran guna untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Laboratorium

komputer salah satu media pengembangan pendidikan berkualitas yang dimana setelah lulusan sekolah mempunyai bekal keterampilan dan sikap nantinya. Pemanfaatan laboratorium komputer dan juga sarana prasarana yang ada maka itu yang bisa menjawab tantangan atau masalah pendidikan dunia usaha saat ini, dan laboratorium ini membantu peningkatan kualitas, skill dan produktivitas dunia usaha.

Pemanfaatan laboratorium komputer yang baik salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pendidikan disekolah khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Laboratorium komputer sangat perlu diakrenakan sebagai tempat latihan cara menggunakan komputer dan aplikasinya yang mengikuti program pembelajaran serta kurikulum yang ada pada sekolah tersebut. Sedangkan laboratorium yang memiliki fasilitas yang baik dan lengkap serta kemampuan yang dimiliki guru dalam pembelajaran akan memberikan motivasi semangat pada peserta didik untuk belajar dan berlatih.

Dengan adanya fasilitas laboratorium komputer dapat memudahkan peserta didik dalam melaksanakan ujian seperti ujian komputer, sekolah dan keperluan lainnya. SMK Nurul Huda memiliki ekstrakurikuler Hockey yang mengalami peningkatan juara 1 lomba di tingkat provinsi mulai tahun 2012 sampai sekarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu adanya fasilitas antar jemput yang dapat memudahkan peserta didik bersekolah sehingga tidak terlambat.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yang menjadi animo daya tarik masyarakat sebagai orang tua terhadap pendidikan gratis di SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

1. SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Kabupaten Ogan Ilir tidak hanya menyelenggarakan sekolah gratis tetapi juga menyediakan fasilitas laboratorium komputer, fasilitas antar jemput bagi peserta didik dan tersedianya bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar)

2. SMK Nurul Huda memiliki ekstrakurikuler Hockey yang mengalami peningkatan juara 1 lomba di tingkat provinsi mulai tahun 2012 sampai sekarang mengalami peningkatan setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abd RBP, Munandar SA, Fitriani A, Karlina Y dan Yumriani. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* Vol. 2. No (2022): 2-3.
- Azzahra IM, Ichsan dan Andriani KM. "Minat Orangtua Menyekolahkan Anak Di Lembaga Paud Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Audhi* Vol. 5 No. (2022): 44-45.
- Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Dimmera BG dan Purnasari PD. *Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang*. Subatik, 2019.
- Hariyadi AB dan Hariyati N. "Pentingnya Fasilitas Belajar Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* Vol. 8 No. (2020): 559-561.
- Maliangga M, Walewangko EN dan Londa AT. "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kart Indonesia Pintar (KIP) Dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmian Efisiensi*. Vo. 19. No. 1. Hal: 34-35." *Berkala Ilmian Efisiensi* 19 (2019): 34-35.
- Pratikno Heru. "Persepsi Orang Tua Terhadap Penentuan Sekolah Bilingual Jenjang PAUD Dan SD Pada Masa Pandemi Covid-19. *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1 (2021): 64-65.
- Siti Sholikhah. "Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anak Di KB Aisyiyah 30 Surabaya. *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini*." *Pedagogik* 5 (2019): 88-90.
- Verdiyani Ristaulina. "Analisis Animo Masyarakat Dalam Memilih Sekolah Anak SD Wuluhadeg Dan SD IT Assalaam. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2 (2016): 1-2.
- Verto Septiandika. "Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (Pip) Bagi Siswa Kurang Mampu (Studi Pada SDN]rebeng Wetan Tahun 2016)." *Pedagogy* (2017): 52-56.